

**DAMPAK PUTUSAN MK 83/PUU-XXI/2023 TERHADAP
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN MENURUT UU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

SKRIPSI

Oleh :

**AHSAN FAHMI ULA
2240057027**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**DAMPAK PUTUSAN MK 83/PUU-XXI/2023 TERHADAP
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN MENURUT UU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

**AHSAN FAHMI ULA
2240057027**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan “sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lain.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Ahsan Fahmi Ula

NIM : 2240057027

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021.”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 04 Februari 2025

Ahsan Fahmi Ula
NIM : 2240057027



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Ahsan Fahmi Ula
NIM : 2240057027
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023
terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan
Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 04 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

NIDN 0020096802

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN 0302117904

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN 0327046303



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN 0302117904



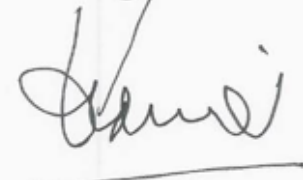
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ahsan Fahmi Ula
NIM : 2240057027
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : **Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan menurut UU Nomor 7 Tahun 2021**

oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Anggota	
I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

Halaman Pengesahan

**Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti
Permulaan menurut UU Nomor 7 Tahun 2021**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Ahsan Fahmi Ula
NIM : 2240057027
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Diperiksa di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 4 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat :

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Anggota Tim Penguji

I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Ahsan Fahmi Ula
NIM : 2040057027
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **"Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021"**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 2025

Yang menyatakan,

Ahsan Fahmi Ula
NIM : 2240057027

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Dampak Putusan MK 83/PUU- XXI/2023 terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelas kesarjanaan Strata-1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Di dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

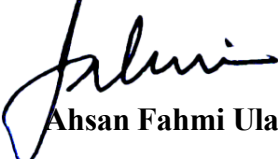
1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil rektor akademik Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing I yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, masukan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum.
5. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi untuk arahan dan masukannya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan.
7. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Para Dosen dan seluruh jajaran di Fakultas Hukum Universitas Kristen

Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah.

9. Orangtua penulis, Prof. Dr. Sholihan, M.Ag. dan Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., yang telah membimbing dan mendorong penulis untuk terus belajar.
10. Istri tercinta, dr. Muna Yusinda dan anak-anak terkasih, Aqila Ilma Maziya dan Aisha Hilma Majida yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis.
11. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan seperjuangan penulis, Stevanus H.P. Aruan, S.E.,Ak., M.Si., Aris Hidayat, S.Mn., M.M., dan Dra. Maria Ariani Aruan, S.H., M.H., yang bersama-sama saling menyemangati dari awal perkuliahan sampai sidang Skripsi.
12. Rekan-rekanku, teman-teman seperjuangan kelas Karyawan FH UKI dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dengan rendah hati penulis menerima masukan yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang di kemudian hari.

Jakarta, 04 Februari 2025


Ahsan Fahmi Ula
2240057027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI MISI	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Maksud Dan Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konsep	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Mengenai Teori-Teori	20
1. Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch	20

2.	Teori Penegakkan Hukum oleh Soerjono Soekanto.....	23
B.	Aspek Konstitusional Dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	26
1.	Pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan	15
2.	Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan	16
3.	Laporan dan Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan	16
4.	Ketentuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan 17	
C.	Wewenang Dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi	30
1.	Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945.....	15
2.	Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Menurut UU Mahkamah Konstitusi	16
D.	Tinjauan Umum Putusan MK 83/PUU-XXI/2023	37
BAB III ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN DIRJEN PAJAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP		38
A.	Permohonan Uji Materi Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	38
1.	Pemohon.....	38
2.	DPR dan Pemerintah	50
B.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	56
1.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	56
2.	Pertimbangan Hukum.....	56
3.	Amar Putusan	60
C.	Analisis Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023	62
1.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU/XXI/2023	64
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU/XXI/2023 menambahkan norma baru dalam putusan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.....	65
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU/XXI/2023 tidak	

menjelaskan makna dari upaya paksa sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.....	69
BAB IV DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXI/2023 TERHADAP PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN .	73
A. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap Penegakkan Hukum	73
B. Upaya yang Perlu Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU/XII/2023 dengan Menggunakan Teori Penegakkan Hukum	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89



ABSTRAK

- A. Nama : Ahsan Fahmi Ula
B. NIM : 2240057027
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul : Dampak Putusan MK 83/PUU XXI/2023 Terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021
E. Halaman : i-xiii, 91 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepastian Hukum, Hak Wajib Pajak
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 terhadap pemeriksaan bukti permulaan dalam sistem perpajakan Indonesia. Putusan ini membatasi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan melarang tindakan upaya paksa seperti penyitaan dan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Pembatasan ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas penegakan hukum pajak, khususnya dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran perpajakan yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan guna memahami sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada sistem pemeriksaan bukti permulaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan ini dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum perpajakan, mengingat tindakan pemeriksaan bukti permulaan merupakan tahapan penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana pajak. Di sisi lain, putusan ini juga meningkatkan perlindungan hak wajib pajak dengan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak.

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak wajib pajak dan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatur prosedur pemeriksaan bukti permulaan agar tetap memberikan ruang bagi fiskus dalam menindak pelanggaran pajak tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan pengaturan yang lebih jelas, kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan dapat terjaga, sehingga penegakan hukum perpajakan tetap berjalan optimal tanpa menghambat proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana perpajakan.

- H. Daftar Acuan : 15 buku, 21 peraturan perundang-undangan, 7 jurnal/artikel
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Dosen
Pembimbing II : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, 04 Februari
2025 Penulis,

Ahsan Fahmi Ula
2240057027



ABSTRACT

- A. Name : Ahsan Fahmi Ula
B. NIM : 2240057027
C. Specific Program : Public Law
D. Title : “Dampak Putusan MK 83/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021”
E. Keyword : Constitutional Court Decision (MK), Preliminary Evidence Examination, Legal Certainty, Taxpayer Rights
F. Page : 91 (numeric) + i-xiii (roman) pages
G. Summary :

This study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 on preliminary evidence examination in Indonesia's tax system. The ruling restricts the Directorate General of Taxes' authority to conduct preliminary evidence examinations by prohibiting coercive actions such as seizures and searches without court approval. This limitation has sparked debates regarding the effectiveness of tax law enforcement, particularly in detecting and prosecuting tax violations that may harm state revenue. Therefore, this research aims to analyze the legal implications of the ruling and its influence on the Directorate General of Taxes' authority in enforcing tax laws.

This study employs a normative legal research method with a statutory and case approach. It examines relevant legislation, court decisions, and legal theories to assess the extent to which the Constitutional Court ruling affects the preliminary evidence examination system. The findings indicate that the restriction of authority may weaken tax law enforcement effectiveness, as preliminary evidence examination is a crucial step in uncovering suspected tax crimes. On the other hand, the decision enhances taxpayer rights protection by preventing potential abuse of power by tax authorities.

Based on the research findings, it is concluded that a balance is needed between protecting taxpayer rights and ensuring effective tax law enforcement. The government must formulate a more comprehensive policy to regulate the procedures for preliminary evidence examination, allowing tax authorities to take action against tax violations while respecting human rights principles. With clearer regulations, legal certainty for both taxpayers and tax authorities can be maintained, ensuring optimal tax law enforcement without hindering the recovery of state losses due to tax crimes.

- H. Reference : 15 books, 21 legislations, 7 journals/articles
I. Thesis Advisor I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Thesis Advisor II : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, February 4th, 2025
Writer,

Ahsan Fahmi Ula
2240057027